

UPAYA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA (PPSNZJ) DALAM MEWUJUDKAN PRODUK PERIKANAN TANGKAP YANG LEGAL SEBAGAI KRITERIA EKSPOR MENUJU KAWASAN UNI EROPA

Adrian Roderica Fachrawa^{1*}, Yeyen Subandi², Diansari Solihah Amini³

^{1,2,3}Universitas Respati Yogyakarta
rfian1101@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 341-346

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/600>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.600>

Article History:

Received: 22-04-2023

Revised: 01-06-2023

Accepted: 07-06-2023

Abstract : The rise of Illegal Fishing trends has encouraged the government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to carry out a certification program for capture fishery products. This is to meet export requirements to various countries, especially the European Union. This research contains the efforts of the Nizam Zachman Jakarta Ocean Fishery Port agency (PPSNZJ) in realizing legal capture fisheries products so that they can compete at the global level according to FAO standards (with the implementation of the Port State Measure Agreement). The research method used is a qualitative method based on literature studies (based on institutional liberalism approaches and international regimes) as well as the author's research and experiences while carrying out field work practices at PPSNZJ agencies. Research related to the certification of capture fishery products by PPSNZJ can provide an overview of how this agency implements government programs and services for the community, especially in the field of fishery product certification. The importance of research studies related to a country's efforts to eradicate illegal fishing is a form of the author's commitment to realizing the development of the academic world.

Keywords : IUU Fishing, SHTI, Catch Certificate, FAO, PPSNZJ

Abstrak : Maraknya tren *Illegal Fishing* mendorong pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan program sertifikasi terhadap produk perikanan tangkap (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan/SHTI). Hal tersebut guna memenuhi syarat ekspor ke berbagai negara khususnya kawasan Uni Eropa. Penelitian ini memuat tentang upaya instansi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) dalam mewujudkan produk perikanan tangkap yang legal agar mampu bersaing di tingkat global sesuai dengan standar FAO (dengan implementasi *Port State Measure Agreement*). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan studi pustaka (berlandaskan pada pendekatan liberalisme institusional dan rezim internasional) serta riset dan pengalaman penulis selama melaksanakan praktek kerja lapangan di instansi PPSNZJ. Penelitian terkait sertifikasi produk perikanan tangkap oleh PPSNZJ dapat memberikan gambaran tentang bagaimana instansi tersebut dalam melaksanakan program pemerintah serta pelayanan untuk masyarakat terutama dalam bidang sertifikasi produk perikanan. Pentingnya riset studi terkait upaya suatu negara dalam memberantas *illegal fishing* adalah suatu bentuk komitmen penulis dalam mewujudkan perkembangan dunia akademis.

Kata Kunci : IUU Fishing, SHTI, Catch Certificate, FAO, PPSNZJ

PENDAHULUAN

Maraknya tren penangkapan ikan ilegal membuat banyak negara mengalami kerugian baik dari sektor ekonomi hingga degradasi sumber daya. Wilayah Asia-Pasifik merupakan salah satu wilayah yang menjadi cakupan Food and Agriculture Organization (FAO) dalam fokusnya untuk mereduksi dan menangani permasalahan trend *IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)*. Sertifikasi produk hasil laut, diperlukan dalam rangka sebagai syarat ekspor dan impor ke suatu regional hingga lingkup internasional khususnya di wilayah Uni Eropa dan wilayah yang memiliki kebijakan sertifikasi legal produk laut. Food and Agriculture Organization of the United Nations memiliki standar legal *PSM Agreement* bagi aktivitas ekspor dan impor terutama dalam bidang pangan. Salah satu diantaranya adalah ekspor produk perikanan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas ekspor impor. *PSM "Port State Measure Agreement"*. PSMA yang telah ditetapkan, dapat dilihat sebagai sebuah rezim internasional yang dapat mengatur tentang berjalannya suatu aktivitas penangkapan ikan.

Pelabuhan Perikanan adalah sebagai sarana pokok untuk kegiatan usaha penangkapan ikan dan mempunyai peranan yang sangat strategis penting di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. Hal tersebut memungkinkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memanfaatkan pelabuhan sebagai instrumen untuk memantau serta mengelola aktivitas penangkapan ikan di seluruh wilayah Indonesia yang tercakup. Aktivitas ekspor merupakan salah satu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi negara. Maka dari itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan rezim internasional yang terbentuk dalam mengatur hal aktivitas ekspor, khususnya produk perikanan. Salah satu pelabuhan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dan diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi hasil tangkap ikan, adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).

Pelabuhan PPSNZJ merupakan pelabuhan samudera dari berbagai pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Di pelabuhan tersebut dapat dilihat berbagai kapal tangkap yang rata-rata volume nya sebesar 250 GT (Gross Tonnage). Kemudian dari aktivitas penangkapan ikan tersebut, memerlukan sertifikasi penangkapan sebagai syarat legal agar pelaku usaha dapat melakukan aktivitas ekspor dan impor dalam lingkup internasional (Badan Pusat Statistik, 2021). PPSNZJ sebagai instansi yang bergerak dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peranan serta upaya yang penting dalam mewujudkan perikanan tangkap yang bersih, legal serta teratur. Kualifikasi, pencatatan seluruh dokumen legalitas kapal (kedatangan dan penangkapan), hingga cara penanganan ikan yang baik merupakan suatu wujud konsistensi dan komitmen PPSNZJ dalam mewujudkan produk perikanan tangkap yang legal dan dapat bersaing di lingkup internasional.

METODE PENELITIAN

Pada studi penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan penulis yaitu berupa metode pengumpulan data dan analisis yang merupakan jenis dari penelitian yang bersifat deskriptif serta eksplanatif. Metode kualitatif yang digunakan penulis meraih sumber dengan sumber data yang bersifat primer dan sekunder. Adapun sumber data yang didapatkan adalah melalui sumber *website* resmi, literatur jurnal, buku dan dokumentasi dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ). Metode ini digunakan penulis untuk memberikan eksplanasi serta gambaran terkait upaya PPSNZJ dalam mewujudkan produk perikanan tangkap yang legal sebagai kriteria ekspor menuju kawasan Uni Eropa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia di teluk Jakarta dengan luas wilayah sebesar 110 Ha yang terdiri dari 40 Ha (kolam pelabuhan) dan 70 Ha berupa daratan hasil reklamasi. PPSNZJ merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang mulai dibangun pada tahun 1980 dan diresmikan tanggal 17 Juli 1984. PPSNZJ

memiliki fungsi dan tujuan untuk melanjutkan revitalisasi industri perikanan tangkap dan infrastruktur pendukungnya pelabuhan perikanan merupakan suatu kawasan sentra bisnis untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0 serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya (reformasi birokrasi PPSNZJ) (Humas PPSNZJ, 2020). Dalam instansi PPSNZJ terdapat berbagai pelayanan umum yang diberikan untuk mengurus segala bentuk dokumen legalitas suatu produk atau hasil tangkapan ikan. PPSNZJ terdiri dari dua divisi kantor yang beroperasi di area pelabuhan. Divisi tersebut adalah unit pelaksana teknis sebagai dan unit pelayanan terpadu. Unit pelaksana teknis bergerak dalam bidang administrasi pelabuhan, kemudian unit pelayanan terpadu bergerak dalam bidang pelayanan umum (mencakup pelayanan sertifikasi produk perikanan tangkap).

Tren *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di Kawasan Asia-Pasifik

Dilansir dari FAO (Food and Agriculture Organization) of the United Nations, budaya *IUU Fishing* bertahan karena sifatnya yang menguntungkan. Masalah *IUU Fishing* terus melemahkan sumber daya nasional dan daerah dalam upaya pengelolaan perikanan. Di Region Asia-Pasifik, terdapat sejumlah besar orang dan kapal, terutama pukat skala menengah, jaring dorong, dan kapal bermotor yang lebih besar, yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Ada lebih dari 3,5 juta kapal penangkap ikan di wilayah tersebut, yang lebih dari 80 persen panjangnya kurang dari 12 meter. Dengan jumlah yang besar, tentu pemerintah tidak mudah dalam mengatur hal tersebut. Dalam kata lain, pemerintah memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi sekelompok organisasi atau perseorangan untuk bersikap tegas dalam menindak *IUU Fishing* (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 2016).

Inisiatif regional Asia-Pasifik FAO untuk Pertumbuhan Biru (RI-BG) adalah suatu program dari FAO untuk membantu negara-negara untuk mencapai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan efisien dalam perikanan tangkap dan budi daya, jasa ekosistem, perdagangan, mata pencaharian, dan sistem makanan. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi transisi ke teknik penangkapan ikan yang meminimalisir terjadinya degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati dan sesuatu yang tidak berkelanjutan dari penggunaan sumber daya sambil memaksimalkan ekonomi dan manfaat sosial yang membangun masyarakat yang tangguh. inisiatif RI-BG membantu memastikan implementasi instrumen global yang bekerja untuk mempromosikan penangkapan ikan yang legal dan diatur. FAO secara berkala mengutus konsultan-konsultan ke berbagai negara yang meratifikasi atau mengimplementasikan *PSM Agreement* untuk melakukan inspeksi. Inspeksi yang dilakukan adalah bersifat keseluruhan daripada pelayanan instansi dalam meregulasi penangkapan ikan (FAO, 2019).

Dari tujuan yang digagas oleh FAO tentang inisiatif regional Asia-Pasifik FAO untuk pertumbuhan biru dapat dikatakan sebagai sebuah langkah baik kedepan untuk menanggulangi *IUU Fishing* serta dapat mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan yang dimaksud adalah tentang terjadinya kerusakan lingkungan dan biota laut yang diakibatkan dari *IUU Fishing* yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam pemanfaatan hasil laut serta berpotensi menghentikan aktivitas pemanfaatan hasil laut yang berkelanjutan. Dengan terciptanya tujuan inisiatif regional Asia-Pasifik FAO untuk pertumbuhan biru, dapat diharapkan masa depan lingkungan serta biota laut dapat lestari dan aman dari tindakan serta aktivitas yang tidak bertanggung jawab.

Port State Measure Agreement

Setelah putaran negosiasi yang intens yang berlangsung dari Juni 2008 hingga Agustus 2009, Konferensi FAO pada 22 November 2009 menyetujui perjanjian tersebut tentang tindakan negara pelabuhan untuk mencegah, menangkal, dan memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan penangkapan Ikan yang tidak diatur sebagai instrumen Pasal XIV di bawah konstitusi FAO. Segera setelah disetujui, perjanjian dibuka untuk tanda tangan selama satu tahun. Perjanjian ini akan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses dengan penyimpan, direktur jenderal FAO (FAO, n.d.). Perjanjian tentang tindakan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* berusaha untuk mencegah, menghalangi dan memberantas *IUU Fishing* melalui adopsi

dan implementasi langkah-langkah negara pelabuhan yang efektif. Hal tersebut bermaksud sebagai sarana untuk memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya laut hayati secara berkelanjutan. Tujuannya agar perjanjian ini dapat diterapkan secara luas dan efektif oleh para pihak, dalam kapasitasnya sebagai negara pelabuhan, untuk kapal-kapal yang tidak berhak berlayar. Hal tersebut akan berlaku untuk kapal-kapal ketika hendak masuk ke pelabuhan atau selama mereka berada di pelabuhan. *PSM Agreement* memberikan penekanan khusus pada persyaratan dari negara-negara berkembang untuk mendukung upaya mereka dalam mengimplementasikan Persetujuan tersebut. Peraturan daripada perjanjian PSMA FAO pada dasarnya dapat dikatakan sebagai sebuah landasan (rezim) untuk memerangi aktivitas illegal di wilayah laut dan perairan suatu negara. Hal tersebut terang dijelaskan dalam pembukaan dalam dokumen perjanjian PSMA yang berbunyi “kewaspadaan atas kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi pada level regional dan inter-regional untuk memerangi IUU Fishing melalui port state measure”.

Upaya PPSNZJ dalam Memberikan Pelayanan Sertifikasi Tangkap Perikanan.

Terdapat fungsi-fungsi yang meliputi pelayanan publik pada PPSNZJ untuk memberikan pelayanan pada lingkup publik mencakup surat perizinan berlayar yaitu dengan memberikan pelayanan penerbitan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan sebagai pernyataan persetujuan kepada kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan setelah terpenuhinya semua persyaratan dan administrasi di pelabuhan perikanan. Kemudian terdapat pelayanan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal yang memberikan pelayanan penerbitan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan sebagai bukti pemberian izin oleh pihak pelabuhan kepada setiap kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan aktivitas tertentu di dalam pelabuhan. Adapun pelayanan yang diselenggarakan oleh PPSNZJ adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Terpadu

Sebelum sertifikat hasil tangkapan ikan terbit, terdapat kualifikasi bagi para nelayan beserta prosedur penangkapan ikan yang disetujui oleh pemerintah. Bagi kapal yang ingin berlayar harus memiliki berbagai perizinan sebelum berlayar untuk menangkap ikan. Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan sebuah lisensi bagi kapal-kapal ikan yang ingin melakukan pelayaran ke suatu wilayah perairan di Indonesia untuk keperluan penangkapan ikan. Pemohon wajib menyerahkan berbagai persyaratan meliputi surat permohonan, dokumen kapal (Pas kecil/besar, sertifikat kesempurnaan/kelaikan, surat ukur, sertifikat keselamatan, buku kesehatan, sertifikat untuk kapal diatas 30 GT, aktivasi transmiter untuk kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI) dan bukti pembayaran jasa-jasa pelabuhan (biaya kesehatan, tambat labuh, jasa navigasi, dan surat-surat kapal serta biaya kebersihan UPT PPSNZJ).

Kemudian terdapat surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLKK). Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang invoice atau riwayat kapal yang datang berlabuh. Pemohon wajib menyerahkan beberapa persyaratan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk pelayanan meliputi surat permohonan dan dokumen kapal yang meliputi pas kecil/besar, sertifikat kesempurnaan/ kelaikan, surat ukur, sertifikat keselamatan, buku kesehatan, Sertifikat untuk kapal diatas 30 GT, aktivasi transmiter untuk kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/ SIKPI.

Ketika kapal sudah melengkapi dan lolos kualifikasi, berikutnya ada tata cara penanganan ikan yang baik (CPIB). Sertifikat cara penanganan ikan yang baik merupakan sebuah sertifikat yang ditujukan bagi pelaku usaha atau pemilik kapal perikanan. Cara penanganan ikan yang baik adalah cara bagaimana pelaku usaha atau pemilik kapal mampu melakukan penanganan terhadap perikanan hasil tangkap yang bermaksud untuk menjaga agar kualitas ikan tetap segar terjaga sampai kepada konsumen. Terdapat pelayanan cara penanganan ikan dengan baik dengan pelayanan penerbitan sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan. Kemudian akan terbitkan surat yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan saat di atas kapal sampai dengan aktivitas pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan.

Kemudian setelah semua kualifikasi serta prosedur dilaksanakan, SHTI dapat diterbitkan. Pada kantor pelayanan terpadu terdapat pelayanan surat hasil tangkapan ikan yang terdiri dari lembar awal, lembar turunan dan lembar turunan disederhanakan (mencakup ekspor-impor). Pelayanan SHTI Memberikan pelayanan penerbitan surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk tujuan pencatatan dan sebagai dasar ketelusuran ikan hasil tangkapan kapal penangkap ikan. Hal tersebut bertujuan agar produk dapat diterima oleh negara importir sebagai produk legal.

2. Pelayanan Umum

Terdapat pelayanan penanganan pengaduan pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa berupa penerimaan dan penanganan terhadap pengaduan, keluhan, kritik, dan saran dari masyarakat kepada unit pelayanan. Berikutnya pelayanan jasa masuk berlangganan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang telah memiliki sticker pas masuk berlangganan ketika memasuki kawasan PPSNZJ dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang melakukan pembayaran PNBFP ketika memasuki kawasan PPSNZJ. Kemudian terdapat pelayanan sarana dan prasarana yang memberikan pelayanan permohonan penggunaan sarana dan pra sarana dan yang terakhir terdapat pelayanan jasa kebersihan kolam pelabuhan serta pelayanan jasa tambat labuh yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhubungan dengan tambat labuh di kolam PPSNZJ (Humas PPSNZJ, 2020).

Dalam rangka menganalisis studi penelitian yang telah penulis paparkan, Upaya PPSNZJ dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan kalangan pengusaha untuk terus meningkatkan produktivitas perikanan yang bersertifikat. Bila ditinjau dari sudut pandang rezim internasional, implementasi *PSM Agreement* yang telah diupayakan oleh PPSNZJ dapat dikatakan sebagai suatu penerapan yang optimal bagi kepentingan nasional. Berdasarkan pemaparan tersebut, peranan penting PPSNZJ dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu pelayanan yang prima sesuai dengan tujuan daripada instansi. Dengan adanya pelayanan yang diberikan, produk perikanan Indonesia dapat terjamin mutunya dan terbebas dari *IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang diupayakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) dapat dikatakan cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan PPSNZJ mengupayakan berbagai macam protokol untuk ekspor, serta keberhasilannya dalam mewujudkan tingkat kepercayaan para importir di kawasan Uni Eropa. Hal tersebut menjadi poin khusus yang menandai kesuksesan PPSNZJ dalam melaksanakan peraturan pemerintah terkait *PSMA Agreement* yang telah disahkan, yaitu untuk melindungi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah perairan Indonesia serta untuk mewujudkan produk perikanan tangkap yang bebas dari aktivitas ilegal apapun. Seperangkat peraturan yang ada, dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang telah memberikan peranan penting dalam kesuksesan PPSNZJ dalam memberikan pelayanan publik serta disiplin prosedur terhadap segala proses penangkapan ikan hingga sertifikasi legal untuk ekspor, sehingga produk perikanan yang bersih, legal dan teratur dapat terwujud untuk dipasarkan pada pasar domestik hingga pasar internasional. Liberalisme institusional dan rezim dapat dilihat dari eksplanasi penulis serta landasan hukum yang diciptakan oleh FAO dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *PSM Agreement*. Hal tersebut dapat menjadi landasan dalam upaya PPSNZJ dalam mewujudkan visi misi serta tujuannya. Dengan menerapkan berbagai macam protokol, prosedur-prosedur pelaksanaan pelayanan public, serta dengan memastikan bahwa produk perikanan yang telah melalui inspeksi PPSNZJ adalah legal, bersih, dan teratur. Dapat disimpulkan PPSNZJ telah mewujudkan serta mengimplementasikan apa yang sudah menjadi visi misi dan tujuannya yang didasari juga dengan landasan hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, dan ucapan terima kasih yang sama kepada Jurnal yang sudah menerbitkan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. "Statistik Pelabuhan Perikanan 2020". Jakarta. Percetakan Badan Pusat Statistik.
- Bambang Sumiono, dkk. 2019. "Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di WPP NRI 712". Jakarta. AMAFRAD press-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- FAO. 2019. *Combating and Eliminating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing In The Asia-Pacific Region*. Hal 5.
- Food and Agricultural Organizations of The United Nations Agreement on Port State Measures*
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *PSMA Agreement*
- Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana, M.Sc, dkk. 2019. "Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di WPP NRI 713". Jakarta. AMAFRAD press-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Majalah PPSNZJ
- Purwanto, dkk. 2014. *POTENTIAL PRODUCTION OF THE FIVE PREDOMINANT SMALL PELAGIC FISH SPECIES GROUPS IN THE JAVA SEA* Diakses dalam: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/ifrj/article/view/90>. Diakses tanggal 10 Agustus 2022
- Standar Operasional Prosedur Divisi Pelayanan Publik, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dapat diakses dalam Diakses dalam : <https://kkp.go.id/djpt/ppsnzj/page/6800-pelayanan-publik>
- Statistik Pelabuhan Perikanan Tahun 2020. Diakses dalam: <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/29/da710b3ec62462dc4508fe24/statistik-pelabuhan-perikanan-2020.html#:~:text=Tahun%202020%2C%20terdapat%20578%20Pelabuhan,pelabuhan%20perikanan%20terbanyak%20di%20Indonesia>. Diakses tanggal 10 Agustus 2022
- Syaron Brigitte Lantaeda, dkk. Peran Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik Volume 4 No. 048. Diakses dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjincqE1-v7AhWaDrcAHWDmAtAQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2FJAP%2Farticle%2Fdownload%2F17575%2F17105&usg=AOvVaw2wmzhyK_DqU_HWExAsUTBHH